



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 09/KPPU-L/2016
ATAS DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERUSAHAAN GAS
NEGARA DI AREA MEDAN DITINJAU DARI PENGECAULIAN
DALAM PASAL 50 HURUF A UU NOMOR 5 TAHUN 1999**

Oleh

Mentari Dinaresti¹ dan Arvie Johan²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan KPPU yang memutus PT PGN melakukan praktik monopoli di Area Medan yang ditinjau dari Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, melihat implikasi hukum atas praktik monopoli PT PGN dengan analisis pendekatan structure-conduct-performance dan justifikasi hukum atas praktik monopoli PT PGN dengan analisis teori barang publik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan buku primer yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Putusan KPPU dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri. Data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa praktik monopoli yang dilakukan PT PGN di Area Medan dengan menentukan harga gas tinggi telah merugikan para pelaku industri yang menggunakan gas untuk mesin-mesin pabrik, di mana PT PGN merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menjual gas di Area Medan sehingga pelaku industri tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan gas dari PT PGN, di samping itu mesin pabrik sudah tersambung dengan pipa gas dari PT PGN sehingga pelaku industri tidak dapat menggunakan barang substitusi sebagai pengganti bahan bakar gas. Namun praktik monopoli yang dilakukan PT PGN di Area Medan termasuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 karena gas bumi yang disediakan PT PGN merupakan barang publik yang diolah dan disalurkan kepada masyarakat demi mensejahterakan hajat hidup orang banyak dengan biaya APBN dan uang perusahaan.

Kata Kunci: praktik monopoli, BUMN, hukum persaingan usaha.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Konsentrasi Hukum Bisnis.

² Dosen Program S-2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 Atas Dugaan Praktik Monopoli Oleh PT Perusahaan Gas Negara Di Area Medan Ditinjau Dari Pengecualian Dalam Pasal 50 Huruf a UU Nomor 5

Tahun 1999

MENTARI DINARESTI, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

...

**JURIDICAL ANALYSIS OVER BUSINESS COMPETITION
SUPERVISORY COMMISION'S VERDICT NUMBER NO. 09/KPPU-L/2016 ABOUT ALLEGED MONOPOLISTIC PRACTICE BY PT PERUSAHAAN GAS NEGARA REVIEWED FROM EXCLUSION IN ARTICLE 50 LETTER A LAW NO. 5 YEAR 1999**

By

Mentari Dinaresti¹ and Arvie Johan²

ABSTRACT

This study aims to determine Business Competition Supervisory Commision's verdict which sentence PT PGN guilty doing monopolistic practice in Medan Area which reviewed from exclusion in Article 50 Letter a Law No. 5 Year 1999, to determine legal implication of PT PGN's monopolistic practice with structure-conduct-performance approach analysis and legal justification of PT PGN's monopolistic practice with public goods theory analysis.

This type of research is normative juridical way using primarily source through Law No. 5 Year 1999, Business Competition Supervisory Commision's verdict, Government Regulations and Ministerial Regulations. Secondary data through books, related journals and articles. The data obtained are analyzed by statute approach, case approach, comparative approach and conceptual approach.

Based on the results of this research and discussion, it concluded that monopolistic practices conducted by PT PGN in Medan Area by determining high gas prices have harmed industry players which use gas for factory machinery and PT PGN is the only company that sells gas in Medan Area so industry players have no other choice but to use gas from PT PGN, besides, factory machines are already connected with gas pipes from PT PGN so that industry players cannot use substitute goods as a substitute for gas fuel. However, the monopolistic practice of PT PGN in Medan Area are included in the exclusion of Article 50 letter a of Law no. 5 Year 1999 because the natural gas provided by PT PGN is a public good that is processed and distributed to the community for the welfare of the lives of many people at the expense of the national budget and PT PGN's money.

Keywords: monopolistic practice, state-owned enterprise, competition law.

¹ Postgraduate Student Faculty of Law Gadjah Mada University Business Law Concentration.

² Lecturer at the Faculty of Law Gadjah Mada University.